



**BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**



**T.A. 2025**

# **LAPORAN KINERJA**

**BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK**



**Berbakti  
Untuk  
Negeri**

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai rencana. LAKIN BPTP Pontianak ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan serta merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja BPTP Pontianak T.A. 2025.

LAKIN BPTP Pontianak T.A. 2025 disusun atas Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BPTP Pontianak. Penyusunan LAKIN ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Kami menyadari bahwa LAKIN ini masih sangat makro, sehingga memerlukan tambahan analisis yang lebih tajam. Walaupun demikian, kami berharap LAKIN ini dapat memberikan perspektif baru dalam mendukung kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, dan Penguatan Perlindungan Perkebunan serta mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak untuk meningkatkan serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga LAKIN ini mampu memberikan gambaran secara lebih detail tentang Akuntabilitas Kinerja BPTP Pontianak T.A.2025 termasuk capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Kepala Balai,



Gabriel Lulus Puji Hantoro, S.Si.,MP

197109251999031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak, serta memperhatikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Perkebunan, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesai Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gorong Royong”. BPTP Pontianak mempunyai tujuan Mewujudkan perlindungan tanaman perkebunan yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing komoditas perkebunan prioritas di Kalimantan.

Sasaran yang ingin dicapai BPTP Pontianak adalah terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, dan Penguatan Perlindungan Perkebunan serta mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Pengukuran kinerja BPTP Pontianak, realisasi keuangan sebesar 97,46 % dengan realisasi fisik sebesar 98,1%. Pelaksanaan kegiatan BPTP Pontianak tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan langkah-langkah percepatan agar dapat meminimalisir dampaknya bagi pencapaian target kinerja.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A.Latar Belakang</b> .....	1
<b>B.Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPTP Pontianak</b> .....	3
<b>C.Sumber Daya Manusia (SDM)</b> .....	4
<b>D.Potensi Pembangunan Perkebunan</b> .....	5
<b>1.Potensi Strategis</b> .....	5
<b>2. Permasalahan Strategis</b> .....	6
<b>3. Tantangan Pembangunan Perkebunan</b> .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
<b>A.Rencana Strategi (Renstra) 2025–2029</b> .....	9
<b>1. Visi</b> .....	9
<b>2. Misi</b> .....	9
<b>3. Tujuan</b> .....	9
<b>4. Arah Kebijakan</b> .....	10
<b>5. Fokus Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2025.</b> .....	10
<b>6.Strategi</b> .....	11
<b>B. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi</b> .....	11
<b>1. Perjanjian Kinerja</b> .....	11
<b>2. Rencana Aksi</b> .....	13
<b>C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025</b> .....	13
<b>1. Sasaran Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2025</b> .....	13
<b>2 Alokasi Anggaran Berdasarkan KRO/RO</b> .....	13
<b>3 Alokasi anggaran berdasarkan satuan kerja</b> .....	15
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
<b>A. Capaian Kinerja BPTP Pontianak</b> .....	18
<b>1. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak</b> .....	21
<b>2. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak</b> .....	24

3. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Lada di wilayah kerja BPTP Pontianak ..	26
4. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak...	28
5. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak .....	31
6. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	33
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak .....	35
B.Capaian Kinerja Lainnya .....	39
C. Akuntabilitas Kinerja Anggaran. ....	40
D.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
<b>BAB. IV PENUTUP</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	55
<b>Lampiran 1. Struktur Organisasi BPTP Pontianak</b> .....	55
<b>Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPTP Pontianak</b> .....	56
<b>Lampiran 3. Data Kepegawaian BPTP Pontianak</b> .....	59
<b>Lampiran 4. Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak Tahun 2025</b> .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran lokasi kerja SDM BPTP Pontianak per 31 Desember Tahun 2025 .....	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	4
Tabel 3. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan terakhir dan jenis kelamin .....	5
Tabel 4. Perjanjian Kinerja.....	12
Tabel 5. Rencana Aksi.....	13
Tabel 6. Alokasi Anggaran KRO/RO TA 2025 .....	14
Tabel 7. Capaian Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	18
Tabel 8. Realisasi Kinerja BPTP Pontianak terhadap Renstra 2025-2029 .....	20
Tabel 9. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa sawit .....	21
Tabel 10. Data Serangan OPT Kelapa Sawit Tahun 2025 di Kalimantan Barat.....	22
Tabel 11. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa .....	24
Tabel 12. Data Serangan OPT Kelapa Tahun 2025 di Kalimantan Barat.....	25
Tabel 13. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa .....	27
Tabel 14. Data Serangan OPT Lada 2025 di Kalimantan Barat .....	27
Tabel 15. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa .....	29
Tabel 16. Data Serangan OPT Kopi 2025 di Kalimantan Barat .....	30
Tabel 17. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas karet.....	31
Tabel 18. Data Serangan OPT Karet 2025 di Kalimantan Barat .....	32
Tabel 19. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas karet.....	34
Tabel 20. Data Serangan OPT Kakao 2025 di Kalimantan Barat.....	34
Tabel 21. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Permentan Nomor 19 tahun 2018 .....	37
Tabel 22. Perhitungan IKM T.A. 2025.....	37
Tabel 23. Capaian Pelayanan Publik Ditjen. Perkebunan berkualitas.....	37
Tabel 24. Realisasi Anggaran T.A.2025 Berdasarkan KRO/RO .....	40
Tabel 25 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan.....	50
Tabel 26 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas .....	51

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi .....	44
Grafik 2. Serapan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.....	45
Grafik 3. Serapan Penguatan Perlindungan Perkebunan.....	46
Grafik 4. Serapan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan .....	47

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Lakin atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LAKIN intern (laporan triwulanan) dan LAKIN tahunan. LAKIN intern disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LAKIN tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja menjadi kewajiban bagi semua instansi pemerintah, maka Laporan Kinerja menjadi kewajiban bagi semua instansi pemerintah, termasuk BPTP Pontianak dalam mempertanggungjawabkan anggaran dan kegiatan yang telah dikelola selama satu tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, LAKIN juga sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian

Kinerja (PK). Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/IA/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Balai, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029 Revisi II. Visi Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak adalah **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesai Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gorong Royong.”**.

LAKIN merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIN Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, visi, dan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPTP Pontianak pada tahun berikutnya. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPTP Pontianak dalam satu tahun anggaran kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPTP Pontianak**

Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada unit organisasi eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
3. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
6. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
7. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
8. Pelaksanaan pengelolaan hama terpadu;
9. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perlindungan tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
10. Penguatan jejaring kerja sama laboratorium perlindungan tanaman perkebunan; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

Uraian tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan dapat dilakukan secara efektif, terarah, dan akuntabel.

### C. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025 jumlah pegawai BPTP Pontianak berjumlah 64 orang PNS Pusat, 4 orang PPPK Pusat, 4 orang PPPK Paruh Waktu, dan 2 pegawai kontrak, sehingga total seluruh personil BPTP Pontianak sebanyak 74 orang. Jumlah tersebut tersebar di kota Pontianak (Kantor Pusat) sebanyak 53 orang dan di UPPT sebanyak 15 orang.

Tabel 1. Sebaran lokasi kerja SDM BPTP Pontianak per 31 Desember Tahun 2025

No	Lokasi	Jumlah	Keterangan	Status Kepegawaian
1	Kota Pontianak	53	-	PNS dan PPPK Pusat
2	Kab Mempawah	1	UPPT Sungai Pinyuh	PNS Pusat
3	Kab Kubu Raya	2	UPPT Rasau Jaya	PNS Pusat
		2	UPPT Sui Kakap	PNS Pusat
4	Kab Landak	0	-	-
5	Kab Bengkayang	1	UPPT Samalantan	PNS Pusat
6	Kab Singkawang	1	UPPT Singkawang	PNS Pusat
7	Kab Sanggau	1	Sublab Parindu	PNS Pusat
		1	UPPT Parindu	PNS Pusat
		1	UPPT Balai Karangan	PNS Pusat
		1	UPPT Sanggau Kapuas	PNS Pusat
8	Kab Sekadau	0	-	-
9	Kab Sintang	1	UPPT Sintang	PNS Pusat
		1	UPPT Nenak	PNS Pusat
10	Kab Melawi	0	-	-
11	Kab Ketapang	0	-	-
12	Kab Kayong Utara	0	-	-
13	Kab Kapuas Hulu	0	-	-
14	Kab. Sambas	1	UPPT Sambas	PNS Pusat
		1	UPPT Pemangkat	PNS Pusat
<b>Total</b>		<b>68</b>		

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	KEPALA BPTP PONTIANAK	1
2	KASUBBAG TU	1
3	POPT	31
4	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	5
5	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	9
6	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6

NO	JABATAN	JUMLAH
7	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4
8	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1
9	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	1
10	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	1
11	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	1
12	ARSIPARIS TERAMPIL	1
13	OPERATOR LABORATORIUM	2
14	PRANATA SDM APARATUR	1
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3
	JUMLAH	68

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

Tabel 3. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan terakhir dan jenis kelamin

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR DAN JENIS KELAMIN																							
NO	GOL	S3		S2		S1		DIV		DIII		DII		DI		SMA		SMP		SD		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
2	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II	0	0	0	0	1	2	0	0	6	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	19
4	III	0	0	1	0	20	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	41
5	IV	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	JUMLAH	0	0	2	0	23	17	0	0	7	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	68

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

## D. Potensi Pembangunan Perkebunan

### 1. Potensi Strategis

Di Indonesia, perlindungan Perkebunan merupakan isu penting yang melibatkan berbagai aspek seperti keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat adat, perubahan iklim, dan ekonomi. Potensi strategis yang terjadi pada perlindungan Perkebunan di Indonesia :

#### 1. Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pulau Kalimantan memiliki potensi besar untuk pengembangan Perkebunan berkelanjutan, terutama kelapa sawit dan karet. Potensi strategis di sini adalah memprioritaskan pengembangan Perkebunan yang memperhatikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti pengelolaan yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

#### 2. Pengembangan Perkebunan berkelanjutan

Meskipun Kalimantan memiliki lahan yang luas, produktivitas Perkebunan di beberapa daerah mungkin masih bisa ditingkatkan. Potensi strategis disini adalah mengidentifikasi area-area di Kalimantan yang memiliki potensi peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern, pemilihan varietas yang lebih unggul, dan peningkatan manajemen.

### **3. Manajemen Risiko Bencana Alam**

Kalimantan rentan terhadap bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau. Potensi strategis di sini adalah meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan kebakaran, serta mempromosikan praktik-praktik pertanian yang lebih tahan kebakaran.

### **4. Pelindungan Lingkungan dan Konservasi**

Kalimantan memiliki kekayaan alam yang besar, termasuk hutan hujan tropis yang penting untuk keanekaragaman hayati dan perubahan iklim global. Potensi strategis disini adalah mengembangkan kebijakan dan program yang mempromosikan konservasi hutan, restorasi lahan, dan Pelindungan ekosistem yang rentan.

### **5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Melibatkan dan memperkuat peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan Perkebunan menjadi potensi strategis di Kalimantan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

### **6. Kolaborasi antar sektor dan antar pemerintah**

Potensi strategis di Kalimantan juga terletak pada kolaborasi antarsektor dan antarpemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan Perkebunan. Koordinasi yang baik antar berbagai Perkebunan.

## **2. Permasalahan Strategis**

Dari yang telah diidentifikasi, beberapa permasalahan strategis yang dihadapi di lingkup Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan, antara lain :

1. Serangan OPT pada tanaman Perkebunan yang dapat menurunkan produksi
2. Kebakaran lahan dan hutan
3. Pemanasan global dan emisi karbon

4. Sumber Daya Manusia BPTP Pontianak yang terbatas jumlahnya
5. Diseminasi teknologi yang masih kurang

### **3. Tantangan Pembangunan Perkebunan**

Tantangan pembangunan Perkebunan ke depan berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan menjadi :

#### **1. Keseimbangan antara Ekonomi dan Lingkungan**

Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui Perkebunan dengan Pelindungan lingkungan. Ini melibatkan memastikan bahwa pertumbuhan sektor Perkebunan tidak merusak lingkungan alam yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal.

#### **2. Kepemilikan Tanah dan Konflik**

Masalah kepemilikan tanah dan konflik terkait mungkin akan terus menjadi tantangan signifikan. Mengelola konflik antara Perusahaan, Perkebunan, pemerintah, dan masyarakat adat sambil memastikan keadilan dan keberlanjutan akan membutuhkan pendekatan yang cermat dan inklusif.

#### **3. Penerapan Praktik Perkebunan Berkelanjutan**

Memastikan bahwa Perkebunan dikembangkan dan dikelola dengan cara yang berkelanjutan akan menjadi tantangan penting. Ini melibatkan menerapkan praktik-praktik seperti agroforestri, pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya alam secara efisien untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

#### **4. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana**

Menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana seperti kebakaran hutan, banjir, dan longsor akan menjadi tantangan yang signifikan. Pelindungan terhadap Perkebunan dari risiko ini memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang kuat.

#### **5. Teknologi dan Inovasi**

Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan Perkebunan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, mengadopsi teknologi baru dan memastikan aksesnya keseluruhan pemangku kepentingan mungkin menjadi tantangan tersendiri.

## **6. Kebijakan dan Regulasi**

Perubahan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi industri Perkebunan. Menyelaraskan strategi kegiatan direktorat dengan perubahan ini serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan akan menjadi tantangan.

## **7. Kapasitas dan Sumber Daya**

Memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel, anggaran, maupun infrastruktur, akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mungkin diperlukan investasu dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur untuk memperkuat kapasitas direktorat dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategi (Renstra) 2025–2029**

Rencana Strategis Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan, serta sebagai instrumen untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan yang terarah, terukur, dan akuntabel.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, serta instansi terkait lainnya. Untuk menjamin ketercapaian sasaran strategis, Renstra ini diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahunan yang memuat indikator dan target kinerja sebagai bentuk komitmen kinerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.

Dalam rangka menghadapi dinamika Organisme Pengganggu Tumbuhan, dampak perubahan iklim, serta tantangan pembangunan subsektor perkebunan, Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan tanaman perkebunan melalui penerapan prinsip efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang sinergis, Renstra ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing komoditas perkebunan prioritas di Kalimantan.

#### **1. Visi**

Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesai Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gorong Royong.

#### **2. Misi**

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka misi BPTP Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

#### **3. Tujuan**

Mewujudkan perlindungan tanaman perkebunan yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing komoditas perkebunan prioritas di Kalimantan

#### **4. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan subsektor perkebunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Kebijakan perlindungan tanaman perkebunan diarahkan pada penguatan sistem perlindungan tanaman yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim.

Arah kebijakan tersebut meliputi:

1. Penguatan sistem pengamatan, peramalan, dan peringatan dini OPT perkebunan secara terpadu;
2. Peningkatan efektivitas pengendalian OPT perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
3. Peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap serangan OPT strategis dan kejadian luar biasa;
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan tanaman perkebunan;
5. Penguatan koordinasi dan sinergi perlindungan tanaman perkebunan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

#### **5. Fokus Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2025.**

1. Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma:
  - Sarana Pengembangan Kawasan (500 Ha)
2. Penguatan Pelindungan Perkebunan.
  - Sarana Pengembangan Kawasan (8 Unit)
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan:
  - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3 Layanan)
  - Layanan Manajemen SDM Internal
  - Layanan Manajemen Kinerja Internal (1 dokumen)

## 6. Strategi

Strategi perlindungan tanaman perkebunan difokuskan pada komoditas prioritas Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kelapa sawit
  - Penguatan pengamatan OPT utama kelapa sawit;
  - Peningkatan efektivitas pengendalian OPT strategis secara terpadu;
  - Penguatan kesiapsiagaan terhadap dampak perubahan iklim.
2. Karet
  - Penguatan pengendalian OPT utama tanaman karet;
  - Peningkatan penerapan teknologi pengendalian ramah lingkungan;
  - Pendampingan perlindungan tanaman karet pada sentra produksi.
3. Kelapa
  - Penguatan pengamatan dan pengendalian OPT utama kelapa;
  - Peningkatan kapasitas petani dalam perlindungan tanaman kelapa;
  - Penguatan koordinasi perlindungan tanaman kelapa dengan pemerintah daerah
4. Kakao
  - Penguatan pengendalian OPT utama kakao secara terpadu;
  - Peningkatan penerapan teknologi PHT kakao;
  - Pendampingan teknis pada sentra kakao rakyat.
5. Kopi
  - Penguatan pengamatan OPT utama kopi;
  - Peningkatan efektivitas pengendalian OPT kopi;
  - Penguatan perlindungan tanaman kopi berbasis wilayah.
6. Lada
  - Penguatan pengamatan dan pemetaan OPT utama tanaman lada;
  - Peningkatan penerapan pengendalian OPT terpadu dan ramah lingkungan pada tanaman lada;
  - Pendampingan teknis perlindungan tanaman lada pada sentra produksi di Kalimantan.

### **B. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi**

#### **1. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. BPTP Pontianak telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada renstra 2025-2029, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 12 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Pelindungan Perkebunan dan mendukung kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, BPTP Pontianak pada tahun 2025 telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan	1-1	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-2	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-3	Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-4	Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-5	Persentase layanan pelindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
		1-6	Persentase layanan perlindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	2-1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak	3.00 Skala Likert (1-4)

*Sumber: PK Kepala BPTP Pontianak 2025*

## 2. Rencana Aksi

Dalam rangka mengawal dan memantau keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja, maka Rencana Aksi Kinerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Aksi

No	Program / Kegiatan Utama			Anggaran	Fisik	Rencana Capaian			
				Pagu		Tw 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1777		Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp2.512.630.000,00		25%	50%	75%	100%
2	1779		Penguatan Perlindungan Perkebunan	Rp673.991.000,00		25%	50%	75%	100%
3	1780		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp6.704.733.000,00		25%	50%	75%	100%
				<b>Rp 9.891.354.000</b>					

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

## C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

### 1. Sasaran Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2025

BPTP Pontianak menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai pada periode 2025 sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
- b. Penguatan Perlindungan Perkebunan.
- c. Dukungan Manajemen

### 2 Alokasi Anggaran Berdasarkan KRO/RO

Alokasi anggaran Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak berdasarkan KRO/RO Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 6. Alokasi Anggaran KRO/RO TA 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN 2025			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
567521	BPTP PONTIANAK				9.891.354.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				3.186.621.000
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma				2.512.630.000
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				2.512.630.000
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	500 hektar			2.512.630.000
051	Perluasan Tanaman Kelapa				1.651.650.000
052	Peremajaan Tanaman Kelapa				707.850.000
055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan				153.130.000
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	7 unit			473.991.000
051	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)				135.370.000
053	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT				188.550.000
054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan				150.071.000
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan				200.000.000
051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan				200.000.000
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen				6.704.733.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan				6.704.733.000
1780,EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				6.500.733.000
1780.EBA.956	Layanan BMN				9.600.000
052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat				9.600.000
1780.EBA.962	Layanan Umum				623.539.000
052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat				623.539.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran				5.867.594.000
001	Gaji dan Tunjangan				4.068.381.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				1.799.213.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN 2025			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM				150.000.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM				150.000.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				54.000.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				35.000.000
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat				35.000.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	68	Orang		19.000.000
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat				19.000.000

Sumber: BPTP Pontianak 2025

### 3 Alokasi anggaran berdasarkan satuan kerja

Pada tahun anggaran 2025, berikut alokasi anggaran berdasarkan satuan kerja pada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.

#### a) Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan pengembangan Kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma dengan total alokasi dana sebesar Rp 2.512.630.000 dan terdiri atas:

- Perluasan tanaman kelapa dalam di Kab.Bulungan 100 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 491.150.000.
- Perluasan tanaman kelapa di Kab.Ketapang 50 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 230.450.000.
- Perluasan tanaman kelapa di Kab.Sintang 100 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 471.900.000.
- Perluasan tanaman kelapa di Kab.Sanggau 100 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 471.900.000.
- Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam di Kab.Kotawaringin Timur 100 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 466.400.000.
- Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam di Kab. Mempawah 50 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 227.700.000.
- Pengawasan dan pendampingan kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.153.130.000.

Melalui BPTP Pontianak, pemerintah menyalurkan bantuan berupa perluasan dan peremajaan kawasan kelapa seluas 500 hektar. Distribusi dana ini mencakup pengadaan benih siap tanam dan pupuk organik yang akan diserahkan langsung kepada kelompok tani di berbagai kabupaten, seperti Nunukan (100 Ha), Sintang (100 Ha), dan Ketapang (50 Ha). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perkebunan Kelapa di Wilayah Kerja BPTP Pontianak.

#### b) Penguatan Perlindungan Perkebunan

Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup dengan total alokasi dana sebesar Rp 673.991.000 dan terdiri atas :

- Operasional Laboratorium Lapangan (LL) dengan alokasi dana sebesar 135.406.000.
- Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dengan alokasi dana sebesar Rp. 158.800.000.
- Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 179.785.000.
- Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000.

Alokasi anggaran penguatan perlindungan perkebunan merupakan bentuk upaya untuk mitigasi risiko kehilangan hasil akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) khususnya di wilayah kerja BPTP Pontianak. Anggaran diperuntukan untuk operasional Laboratorium Lapangan (LL) di Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, serta pemberdayaan petugas pengamat OPT di seluruh wilayah kerja. Dana ini juga memfasilitasi penerapan teknologi pengendalian OPT perkebunan sebanyak 8 unit sebagai respon cepat terhadap serangan di lapangan.

#### c) Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan dengan total alokasi dana sebesar Rp 6.500.733.000 dan terdiri atas:

- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) UPT Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp 9.600.000.
- Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp.623.539.000.
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.068.381.000
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.1.799.213.000.
- Peningkatan kualitas SDM Pegawai BPTP Pontianak dengan alokasi dana sebesar Rp 150.000.000.
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000.
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000.

Alokasi ini merupakan komponen utama dalam mendukung operasional BPTP Pontianak, dengan rincian sebesar Rp4.068.381.000 diperuntukkan bagi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) guna menjamin keberlanjutan kinerja internal. Proporsi anggaran lainnya dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta penguatan tata kelola manajemen kinerja dan keuangan yang akuntabel

## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja BPTP Pontianak

Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yaitu setelah berakhirnya semua kegiatan untuk mengetahui pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan atau target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan, maka sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu :

- 1) Sangat berhasil (capaian > 100%)
- 2) Berhasil (80% - 100%)
- 3) Cukup berhasil (60% - <80%)
- 4) Kurang berhasil (< 60%)

Capaian kinerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak untuk setiap perjanjian kinerja. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan	1-1	Persentase layanan perlindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil
		1-2	Persentase layanan perlindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		1-3	Persentase layanan perlindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil
		1-4	Persentase layanan perlindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil
		1-5	Persentase layanan perlindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil
		1-6	Persentase layanan perlindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	100%	100%	Berhasil
2	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	2-1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak	3.00 Skala Likert (1-4)	3,70	123 %	Sangat berhasil

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

Berdasarkan Tabel 7. Capaian Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa BPTP Pontianak telah mencapai atau melampaui target pada tahun 2025 dengan 6 Indikator Kinerja dalam kategori Berhasil dan 1 Indikator Kinerja dalam kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan untuk realisasi kinerja pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis organisasi telah memenuhi target tahun ini dari yang telah ditetapkan selama 5 tahun.

Tabel 8. Realisasi Kinerja BPTP Pontianak terhadap Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Realisasi					2025 dibandingkan tahun sebelumnya
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan	1-1	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-
		1-2	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-
		1-3	Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-
		1-4	Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-
		1-5	Persentase layanan pelindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-
		1-6	Persentase layanan pelindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Realisasi					2025 dibandingkan tahun sebelumnya
				2025	2026	2027	2028	2029	
2	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	2-1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak	123%	-	-	-	-	-

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

Berikut Penjelasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja:

### 1. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas kelapa sawit.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Kelapa Sawit : Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas kelapa sawit ) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa sawit dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

Tabel 9. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa sawit

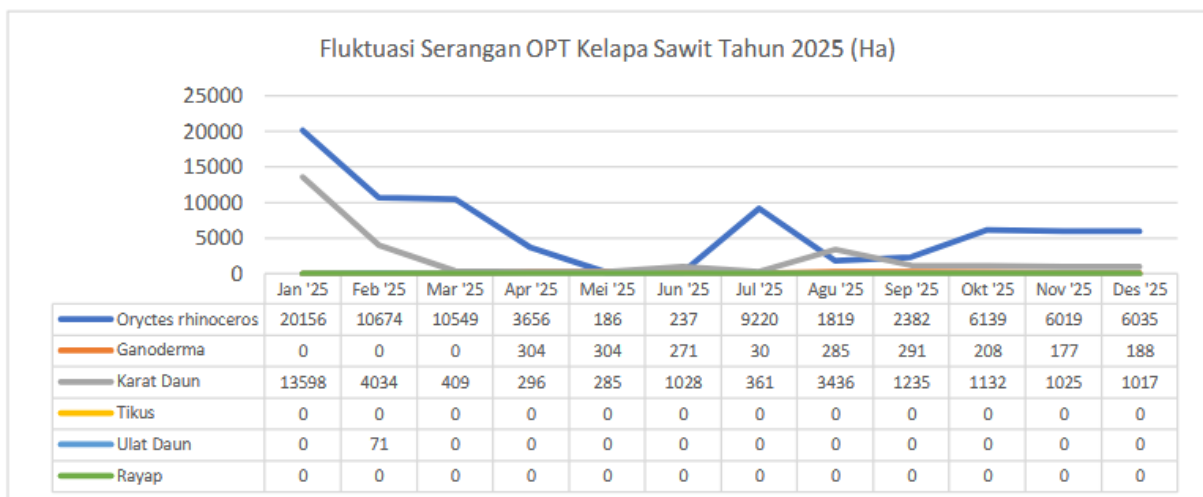
No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah	18	18	100 %	Berhasil

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
	kerja BPTP Pontianak				

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

BPTP Pontianak berhasil memenuhi seluruh permintaan layanan perlindungan untuk komoditas kelapa sawit dengan menerbitkan 18 surat rekomendasi teknis. Berdasarkan data rekapitulasi 2025, detail pengendalian difokuskan pada mitigasi serangan Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS), pencegahan Busuk Pangkal Batang (*Ganoderma*), serta pengendalian hama *Oryctes rhinoceros* di wilayah Melawi, Sanggau, Kubu Raya, Sambas, dan Landak. Layanan ini bertujuan untuk menjaga perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi perkebunan di Kalimantan.

Tabel 10. Data Serangan OPT Kelapa Sawit Tahun 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Kelapa Sawit Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- **Hama Dominan:** Serangan **Kumbang Tanduk (*Oryctes rhinoceros*)** bersifat fluktuatif sepanjang tahun. Tingginya serangan ini dipicu oleh melimpahnya ketersediaan bahan makanan organik seperti sisa pelepah tanaman dan kotoran hewan di area kebun yang mendukung perkembangbiakan larva.

- **Penyakit Tanaman:** Serangan jamur **Ganoderma** dan **Karat Daun** juga terpantau fluktuatif. Peningkatan intensitas serangan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang mempercepat penyebaran spora jamur di lapangan.

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan.

**Analisis Keberhasilan** Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target **100%** dengan menuntaskan **18 permintaan layanan teknis** untuk kelapa sawit. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- **Responsivitas Petugas:** Komitmen petugas POPT dalam melakukan *groundcheck* cepat dan identifikasi laboratorium memungkinkan rekomendasi diterbitkan segera setelah laporan diterima.
- **Dukungan Teknologi:** Penggunaan 8 unit teknologi pengendalian sebagai respon cepat di lapangan membantu memitigasi risiko perluasan serangan.
- **Sinergi Lintas Sektor:** Koordinasi yang baik dengan Dinas Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten mempermudah proses verifikasi data serangan dan distribusi informasi kepada kelompok tani.

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan kelapa sawit di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

## 2. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas kelapa.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Kelapa: Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas kelapa) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

Tabel 11. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	4	4	100 %	Berhasil

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

Capaian layanan untuk komoditas kelapa terealisasi secara maksimal melalui pemenuhan 4 permintaan layanan teknis. Fokus pengendalian berdasarkan hasil identifikasi laboratorium mencakup manajemen serangan hama *Brontispa longissima* dan *Oryctes rhinoceros* di wilayah Kota Pontianak, Sungai Kakap, dan Mempawah. Rekomendasi teknis yang diberikan dengan menekankan pada pembersihan lingkungan pohon dan aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH) untuk menekan tingkat kehilangan hasil.

Tabel 12. Data Serangan OPT Kelapa Tahun 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Kelapa Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- Hama Dominan: Serangan Kumbang Tanduk (*Oryctes rhinoceros*) merupakan ancaman yang paling menonjol dengan tingkat serangan yang bersifat fluktuatif sepanjang tahun,. Tingginya serangan ini dipicu oleh faktor kebersihan lingkungan kebun, di mana melimpahnya ketersediaan bahan makanan organik seperti sisa pelepah tanaman dan kotoran hewan menjadi tempat perkembangbiakan larva yang produktif.
- Hama Lainnya: Serangan Kumbang Janur Kelapa (*Brontispa longissima*) terpantau mengalami tren peningkatan di beberapa titik sentra produksi,. Sebaliknya, gangguan hama sekunder seperti tikus dan tupai menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode tahun sebelumnya.
- Lokasi Sebaran: Konsentrasi serangan dan upaya pengendalian kelapa dalam tahun 2025 terfokus di beberapa wilayah strategis, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya.

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan..

Analisis Keberhasilan Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target 100% dengan menuntaskan 4 permintaan layanan teknis untuk kelapa. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- **Responsivitas Petugas POPT:** Tim teknis melakukan mekanisme *groundcheck* segera setelah laporan diterima, sehingga diagnosa dan rekomendasi pengendalian dapat diterbitkan tepat waktu.
- **Akurasi Diagnosa:** Dukungan validasi laboratorium yang presisi memastikan teknologi pengendalian yang disarankan (seperti aplikasi Agens Pengendali Hayati) efektif menekan populasi OPT sebelum mencapai ambang kerusakan ekonomi,.

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan kelapa di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

### 3. **Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Lada di wilayah kerja BPTP Pontianak.**

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas kopi.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Lada: Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas Lada) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas Lada dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

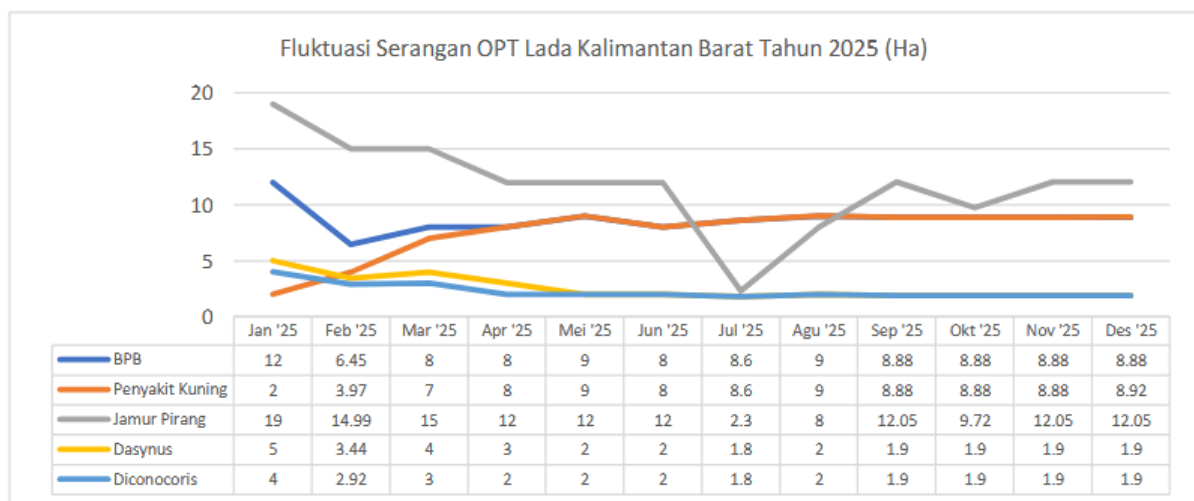
Tabel 13. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	3	3	100 %	Berhasil

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

Layanan pelindungan untuk tanaman lada mencapai target 100% dengan penyelesaian 3 surat rekomendasi. Detail pengendalian diarahkan pada penanganan penyakit Jamur Akar Putih (JAP) dan Busuk Pangkal Batang yang disebabkan oleh patogen *Phytophthora capsici*. Rekomendasi teknis ini sangat penting mengingat lada merupakan komoditas unggulan yang rentan terhadap kelembapan tinggi di wilayah Kalimantan.

Tabel 14. Data Serangan OPT Lada 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Lada 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman lada di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- OPT Dominan: Penyakit Jamur Pirang (*Septobasidium sp.*) tercatat sebagai gangguan yang dominan dan menunjukkan tren cenderung meningkat sepanjang tahun 2025.

- OPT Lainnya: Penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB) dan Penyakit Kuning terpantau dalam kondisi yang cenderung stabil. Demikian pula dengan populasi hama penghisap buah (*Dasynus* sp.) dan penghisap bunga (*Diconocoris* sp.) yang tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan.

Analisis Keberhasilan Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target 100% dengan menuntaskan permintaan layanan teknis untuk lada. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Responsivitas Petugas POPT: Tim teknis melakukan mekanisme *groundcheck* segera setelah laporan diterima, sehingga diagnosa dan rekomendasi pengendalian dapat diterbitkan tepat waktu.
- Ketepatan Intervensi: Rekomendasi teknis difokuskan pada penanganan penyakit kritis seperti Jamur Akar Putih (JAP) dan Busuk Pangkal Batang yang disebabkan oleh patogen *Phytophthora capsica*.

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan lada di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

#### 4. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas kopi.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Kopi: Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas Kopi) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas Kopi dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

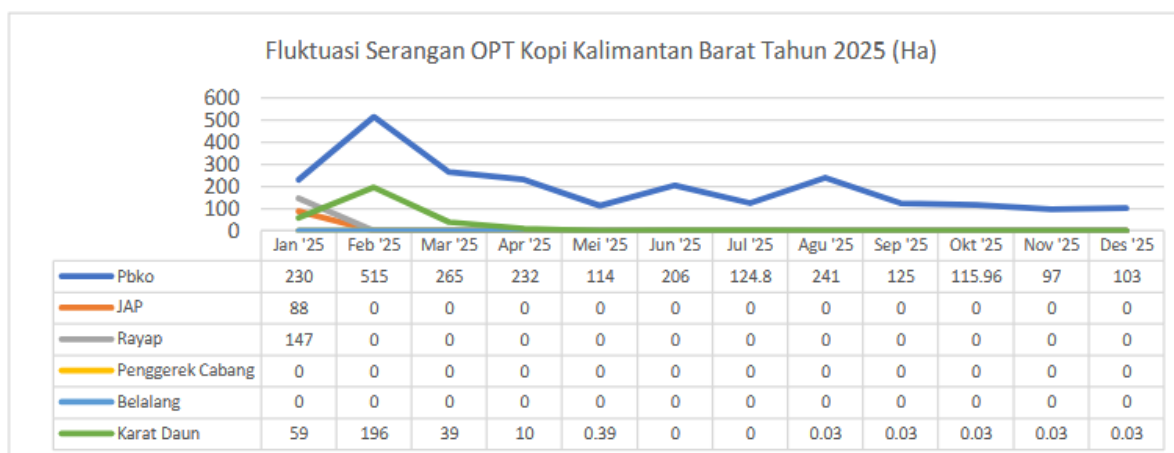
Tabel 15. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas kelapa

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	5	5	100 %	Berhasil

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

Dukungan terhadap layanan pelindungan kopi terlaksana melalui pemenuhan 5 permintaan rekomendasi teknis. Berdasarkan rekapitulasi pelayanan teknik, pengendalian difokuskan pada hama penggerek buah kopi (PBKo/ *Hypothenemus hampei*) yang ditemukan di sentra produksi seperti Sungai Kakap dan Kubu Raya. Petugas memberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan isolat jamur *Beauveria bassiana* untuk menekan populasi hama tersebut secara ramah lingkungan.

Tabel 16. Data Serangan OPT Kopi 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Lada 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- OPT Dominan: Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) yang disebabkan oleh serangga *Hypothenemus hampei* tercatat sebagai gangguan yang paling menonjol di lapangan
- OPT Lainnya: Penyakit Karat Daun Kopi terpantau mengalami tren penurunan serangan yang cukup signifikan selama periode tahun berjalan

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan.

Analisis Keberhasilan Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target 100% dengan menuntaskan permintaan layanan teknis untuk kopi. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Responsivitas Petugas POPT: Tim teknis melakukan mekanisme *groundcheck* segera setelah laporan diterima, sehingga diagnosa dan rekomendasi pengendalian dapat diterbitkan tepat waktu.
- Ketepatan Intervensi: Pendampingan teknis ditekankan pada manajemen hama penggerek buah kopi melalui bimbingan yang responsif terhadap laporan pekebun di lapangan.

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan kopi di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

## 5. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas karet.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Karet: Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas Karet) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas Karet dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

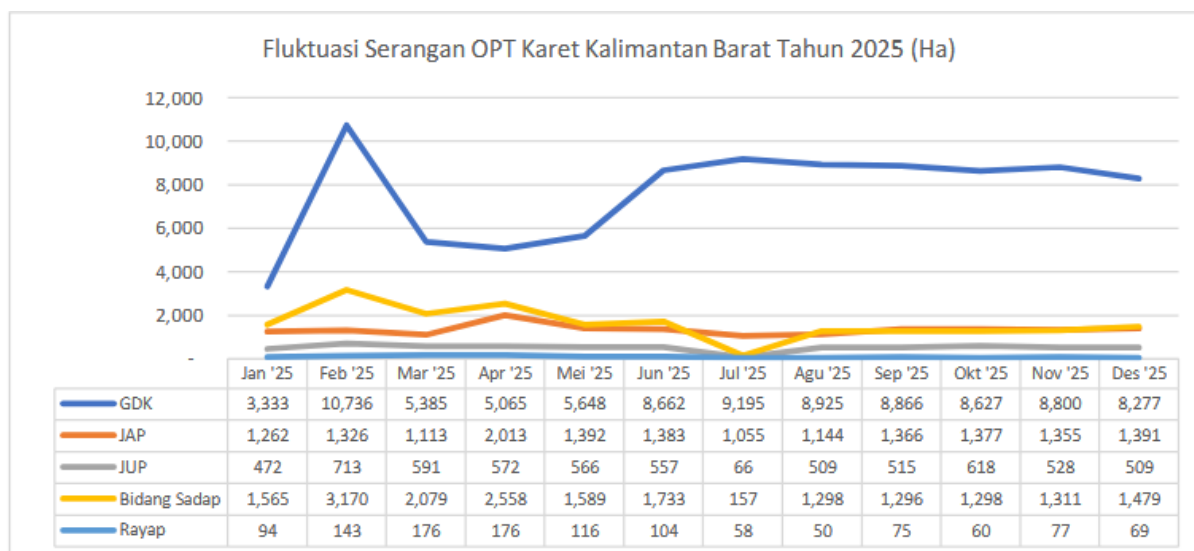
Tabel 17. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas karet

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	1	1	100 %	Berhasil

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

Indikator ini mencapai target fisik 100% dengan diterbitkannya 1 rekomendasi teknis pengendalian. Fokus utama pengendalian mengacu pada manajemen Penyakit Gugur Daun dan Jamur Akar Putih (JAP) di Kabupaten Landak. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah kuratif dan preventif untuk memastikan keberlanjutan produksi karet rakyat yang sering terdampak anomali iklim.

Tabel 18. Data Serangan OPT Karet 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Karet 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman karet di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- OPT Dominan: Penyakit Gugur Daun Karet (GDK) dan Jamur Akar Putih (JAP) tetap menjadi ancaman utama yang mendominasi pertanaman karet di wilayah Kalimantan Barat
- OPT Lainnya: Sepanjang tahun 2025, intensitas serangan GDK, JAP, Jamur Upas, dan rayap menunjukkan kecenderungan menurun. Secara alami, serangan GDK menurun seiring dengan peningkatan hari hujan dengan intensitas curah hujan kategori ringan.

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan.

Analisis Keberhasilan Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target 100% dengan menuntaskan permintaan layanan teknis untuk karet. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Responsivitas Petugas POPT: Tim teknis melakukan mekanisme *groundcheck* segera setelah laporan diterima, sehingga diagnosa dan rekomendasi pengendalian dapat diterbitkan tepat waktu.
- Ketepatan Intervensi: Layanan yang diberikan difokuskan pada manajemen pengendalian Penyakit Gugur Daun dan Jamur Akar Putih (JAP) melalui langkah-langkah kuratif dan preventif untuk menjamin keberlanjutan produksi karet rakyat

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan karet di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

## 6. Persentase Layanan Pelindungan Komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, indikator ini mengukur sejauh mana Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak memberikan layanan teknis kepada masyarakat (pekebun/stakeholder lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas kakao.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah: Persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak (%) = (Total permohonan yang dilayani pada komoditas Kakao: Total permohonan yang masuk/diterima pada komoditas Kakao) X 100%

Berikut tabel Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas Kakao dengan menggunakan data Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak pada Lampiran 4.

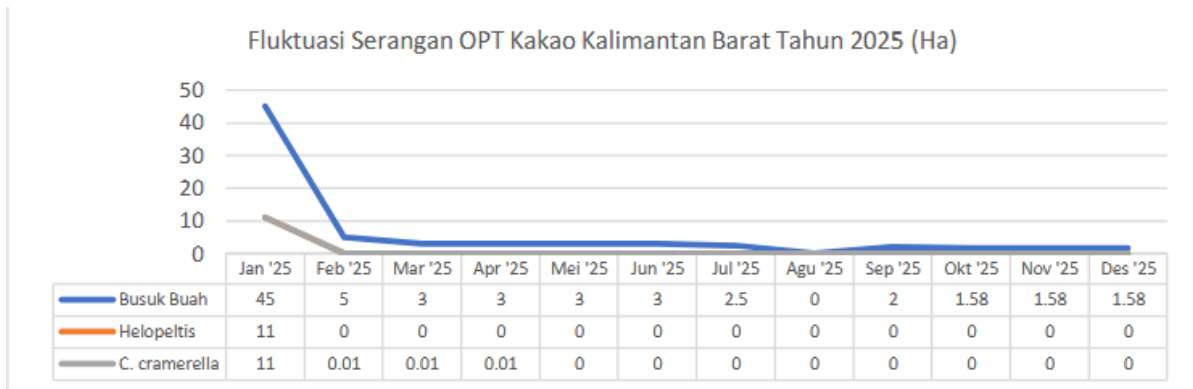
Tabel 19. Capaian Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan komoditas karet

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Permintaan Layanan	Jumlah Permintaan Terpenuhi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase layanan pelindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	1	1	100 %	Berhasil

**Sumber:** BPTP Pontianak 2025

Layanan pelindungan kakao tercapai maksimal dengan menuntaskan 1 surat rekomendasi teknis pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan data teknis, pengendalian diarahkan pada penguatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mengatasi gangguan Hama Penghisap Buah dan penggerek buah kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak. Strategi ini melibatkan penggunaan teknologi pengendali hayati guna meminimalisir penggunaan pestisida kimia.

Tabel 20. Data Serangan OPT Kakao 2025 di Kalimantan Barat



**Sumber :** Laporan Tahunan Monitoring OPT BPTP Pontianak Tahun 2025

Sesuai dengan Data Sebaran OPT Kakao 2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Serangan OPT 2025, dinamika populasi OPT pada tanaman kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- OPT Dominan: Penyakit Busuk Buah Kakao (*Phytophthora palmivora*) tercatat sebagai gangguan yang paling dominan menyerang pertanaman kakao di lapangan.
- OPT Lainnya: Ditemukan pula adanya serangan Kepik Penghisap Buah (*Helopeltis* sp.) pada beberapa titik pengamatan

Indikator Kinerja Persentase layanan perlindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak Tahun 2025 merupakan indikator yang baru, sehingga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya (periode 2020–2024) tidak dapat dilakukan.

Analisis Keberhasilan Pada tahun 2025, BPTP Pontianak berhasil merealisasikan target 100% dengan menuntaskan permintaan layanan teknis untuk kakao. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Responsivitas Petugas POPT: Tim teknis melakukan mekanisme *groundcheck* segera setelah laporan diterima, sehingga diagnosa dan rekomendasi pengendalian dapat diterbitkan tepat waktu.
- Ketepatan Intervensi: Layanan diarahkan pada penguatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mengatasi gangguan hama penghisap buah dan penggerek buah kakao

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi** Guna mempertahankan kinerja layanan perlindungan kakao di masa mendatang, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Digitalisasi Layanan:** Memperluas jangkauan melalui penguatan aplikasi **Mobile DiKLIK** agar akses permohonan rekomendasi oleh pekebun di wilayah terpencil menjadi lebih cepat dan transparan.
- **Optimalisasi Klinik Tanaman:** Meningkatkan frekuensi layanan Klinik Tanaman Keliling untuk memberikan diagnosa langsung di lokasi perkebunan rakyat yang terdampak serangan berat.
- **Edukasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi masif mengenai struktur tarif sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023** untuk menjamin transparansi biaya pelayanan publik.
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pengamat untuk meningkatkan keahlian dalam mendeteksi ancaman OPT baru yang muncul akibat dampak perubahan iklim.

## **7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak**

Berdasarkan Manual IKU Direktorat Jenderal Perkebunan, Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak adalah hasil pengukuran dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak secara berkala untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Metode penghitungan yang digunakan sesuai standar manual IKU adalah:

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM UKPP} \times 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 21. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Permentan Nomor 19 tahun 2018

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 22. Perhitungan IKM T.A. 2025

No	Komponen	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9																									
a	Jumlah responden	70	70	70	70	70	70	70	70	70																									
b	Jumlah nilai per unsur	258	260	253	257	256	265	268	255	25																									
c	NRR per unsur (b : a)	3.69	3.71	3.61	3.67	3.66	3.79	3.83	3.64	3.67																									
d	Bobot nilai rata-rata tertimbang ( 1 : 9 unsur)	0,111111111																																	
e	NRR tertimbang per unsur (c x d)	0.41	0.41	0.40	0.41	0.41	0.42	0.43	0.40	0.41																									
f	Jumlah NRR tertimbang per unsur ( $\sum e$ )	3,70			<b>Sangat Baik</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,6 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,6 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																															
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																															
2	2,6 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																															
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																															
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																															
g	Nilai IKM (f x 25)	<b>92,42</b>																																	

Sumber: SKM BPTP Pontianak 2025

Tabel 23. Capaian Pelayanan Publik Ditjen. Perkebunan berkualitas

No.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Nilai IKM	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan	3	3,70	123 %	Sangat Baik

	Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak				
--	--	--	--	--	--

**Sumber:** SKM BPTP Pontianak 2025

Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak berhasil mewujudkan target kinerja melebihi **100%** pada Indikator Kinerja Utama “Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas” pada tahun anggaran 2025 dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **3,70** dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 (123,33%). Berdasarkan hasil survei terhadap 70 responden yang mencakup berbagai profil pengguna layanan, nilai rata-rata tertimbang tersebut jika dikonversi mencapai angka **92,42**. Angka ini menempatkan kualitas pelayanan publik BPTP Pontianak dalam predikat "**Sangat Baik**", yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan teknis pelindungan perkebunan bagi pelaku usaha, petani, dan akademisi.

**Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya (Tren Kinerja) :** Kinerja pelayanan publik BPTP Pontianak dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren stabilitas nilai IKM dan konsisten berada di atas standar minimal, meskipun terdapat fluktuasi skor dari tahun ke tahun. Berikut adalah perbandingan capaian IKM dari tahun ke tahun:

- **Tahun 2025:** Nilai 3,70 (Konversi 92,42).
- **Tahun 2024:** Nilai 3,66 (Konversi 91,71).
- **Tahun 2023:** Nilai 3,81 (Konversi 95,44).

**Alasan Keberhasilan :** Faktor-faktor utama yang melandasi keberhasilan pencapaian predikat "Sangat Baik" ini adalah:

1. **Kualitas Pelayanan SDM:** Petugas layanan dinilai sangat sopan, ramah, dan komunikatif dalam memberikan bimbingan teknis maupun layanan administratif, sehingga menciptakan pengalaman positif bagi pengguna layanan.
2. **Responsivitas Layanan Klinik:** Keberadaan Klinik Tanaman dan layanan respon cepat terhadap laporan serangan OPT memberikan solusi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh petani di lapangan.
3. **Transparansi Informasi:** Upaya organisasi dalam menyediakan kanal informasi yang lebih terbuka membantu masyarakat memahami prosedur layanan secara lebih jelas.
4. **Komitmen Manajemen:** Adanya evaluasi berkala terhadap hasil survei kepuasan pelanggan memungkinkan organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan pada unit-unit pelayanan yang memiliki skor rendah.

**Tindak Lanjut dan Rekomendasi:** Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPTP Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Edukasi Regulasi PNBP:** Melakukan penderasan informasi secara masif kepada pengguna layanan mengenai struktur tarif yang diatur dalam **PMK Nomor 85 Tahun 2023**, mengingat unsur biaya/tarif masih mendapatkan persepsi terendah dibandingkan unsur layanan lainnya.
- **Peningkatan Fasilitas Layanan:** Terus melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan laboratorium untuk memastikan kenyamanan pengguna layanan saat melakukan konsultasi dan kualitas layanan pada pengujian sampel.
- **Penguatan Digitalisasi:** Mengoptimalkan pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana konsultasi *online* guna mempermudah birokrasi antara petugas dan pekebun di wilayah terpencil.
- **Pengembangan Kapasitas Petugas:** Melaksanakan pelatihan komunikasi efektif secara berkala bagi petugas garda terdepan untuk menjaga standar keramahan dan profesionalisme layanan.

## **B. Capaian Kinerja Lainnya**

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan *Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma* dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan perkebunan di wilayah kerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penguatan komoditas strategis subsektor perkebunan melalui pendekatan kawasan berbasis komoditas unggulan. Total alokasi dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar **Rp2.514.470.000**, yang terdiri dari kegiatan:

- Perluasan tanaman kelapa dalam di Kab. Nunukan 100 Ha
- Perluasan tanaman kelapa dalam di Kab.Ketapang 50 Ha
- Perluasan tanaman kelapa dalam di Kab.Sintang 100 Ha
- Perluasan tanaman kelapa dalam di Kab.Sanggau 100 Ha
- Peremajaan tanaman kelapa di Kab.Kotawaringin 100 Ha
- Peremajaan tanaman kelapa di Kab.Mempawah 50 Ha

Hingga **Desember Tahun 2025**, realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai **98,85%** atau sebesar **RP 2.483.771.215**. Capaian ini bahwa kegiatan peremajaan dan perluasan tanaman kelapa telah dilaksanakan sesuai dengan ekspektasi.

### C. Akuntabilitas Kinerja Anggaran.

Tabel 24. Realisasi Anggaran T.A.2025 Berdasarkan KRO/RO

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN 2025											
		Volume Rincian Output	Jenis Komponen (Utama/ Pendukung)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	DESEMBER	TOTAL	SISA	%	FISIK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
567521	BPTP PONTIANAK						9.891.354.000	1.035.580.287	9.640.338.704	251.015.296	97,46		98,10
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						3.186.621.000	820.380.535	3.133.016.321	53.604.679	98,32		98,74
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma						2.512.630.000	674.171.321	2.483.771.215	28.858.785	98,85		99,14
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	400	Hektar				2.512.630.000	674.171.321	2.483.771.215	28.858.785	98,85		99,14
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	400	Hektar	500 hektar			2.512.630.000	674.171.321	2.483.771.215	28.858.785	98,85		99,14
051	Perluasan Tanaman Kelapa						1.665.400.000	626.420.960	1.645.318.180	20.081.820	98,79		99,10
A	Perluasan Tanaman Kelapa Dalam di Kab. Bulungan 100 Ha						491.150.000	484.535.480	484.535.480	6.614.520	98,65		98,99
B	Perluasan Tanaman Kelapa Dalam Kab. Ketapang 50 Ha						230.450.000	-	229.892.740	557.260	99,76		99,82
C	Perluasan Tanaman Kelapa Dalam Kab. Sintang 100 Ha						471.900.000	-	465.857.480	6.042.520	98,72		99,04
D	Perluasan Tanaman Kelapa Dalam Kab. Sanggau 100 Ha						471.900.000	141.885.480	465.032.480	6.867.520	98,54		98,91
052	Peremajaan Tanaman Kelapa						694.100.000	-	686.587.220	7.512.780	98,92		99,19
A	Peremajaan Tanamaan Kelapa Dalam di Kab. Kotawaringin Timur 100 Ha						466.400.000	-	462.194.480	4.205.520	99,10		99,32
B	Peremajaan Tanamaan Kelapa Dalam di Kab. Mempawah 50 Ha						227.700.000	-	224.392.740	3.307.260	98,55		98,91
055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan						153.130.000	47.750.361	151.865.815	1.264.185	99,17		99,38
A	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Provinsi Kalimantan Tengah						4.160.000	-	3.640.000	520.000	87,50		90,63
B	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Kab. Kotawaringin Timur						6.930.000	-	6.886.000	44.000	99,37		99,52
C	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Provinsi Kalimantan Barat						6.120.000	2.905.000	5.865.000	255.000	95,83		96,88
D	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Kab. Ketapang						3.610.000	3.608.000	3.608.000	2.000	99,94		99,96
E	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Kab. Sintang						7.220.000	1.280.000	7.220.000	-	100,00		100,00
F	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Kab. Sanggau						7.220.000	5.570.000	7.220.000	-	100,00		100,00
G	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Provinsi Kalimantan Utara						1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	100,00		100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL	PERHITUNGAN 2025											
		Volume Rincian Output	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	DESEMBER	TOTAL	SISA	%	FISIK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Tanaman Kelapa Kab. Bulungan						7.510.000	7.510.000	7.510.000	-	100,00		100,00
I	Pengawasan dan Pendampingan Kawasan Tanaman Kelapa BPTP Pontianak						105.050.000	24.762.361	104.606.815	443.185	99,58		99,68
J	Pengawasan dan Pendampingan Kawasan Tanaman Kelapa Kab. Mempawah						3.610.000	415.000	3.610.000	-	100,00		100,00
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan						673.991.000	146.209.214	649.245.106	24.745.894	96,33		97,25
1779.CAG	Sarana Pengembangan Kawasan	7	Unit	8 unit			673.991.000	146.209.214	649.245.106	24.745.894	96,33		97,25
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	7	Unit	7 unit			473.991.000	133.420.434	451.296.666	22.694.334	95,21		96,41
051	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)						135.406.000	15.045.000	127.457.300	7.948.700	94,13		95,60
A	Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - Kalsel						45.646.000	500.000	44.142.900	1.503.100	96,71		97,53
B	Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - Kalteng						43.840.000	-	43.300.000	540.000	98,77		99,08
C	Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - Kaltim						45.920.000	14.545.000	40.014.400	5.905.600	87,14		90,35
053	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT						158.800.000	38.925.000	151.590.000	7.210.000	95,46		96,59
A	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Kalteng						46.070.000	20.140.000	46.040.000	30.000	99,93		99,95
B	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Kalsel						52.930.000	-	52.900.000	30.000	99,94		99,96
C	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Kaltim						40.270.000	9.675.000	40.260.000	10.000	99,98		99,98
D	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Kaltara						19.530.000	9.110.000	12.390.000	7.140.000	63,44		72,58
054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan						179.785.000	79.450.434	172.249.366	7.535.634	95,81		96,86
A	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan - BPTP Pontianak						136.350.000	78.883.634	129.627.216	6.722.784	95,07		96,30
B	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan - Kalteng						14.630.000	-	14.516.000	114.000	99,22		99,42
C	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan - Kalsel						13.940.000	500.000	13.880.750	59.250	99,57		99,68
D	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan - Kaltim						14.865.000	66.800	14.225.400	639.600	95,70		96,77
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1	Unit				200.000.000	12.788.780	197.948.440	2.051.560	98,97		99,23
051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan						200.000.000	12.788.780	197.948.440	2.051.560	98,97		99,23
A	Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan OPT Penting Perkebunan						39.200.000	500.000	38.462.278	737.722	98,12		98,59

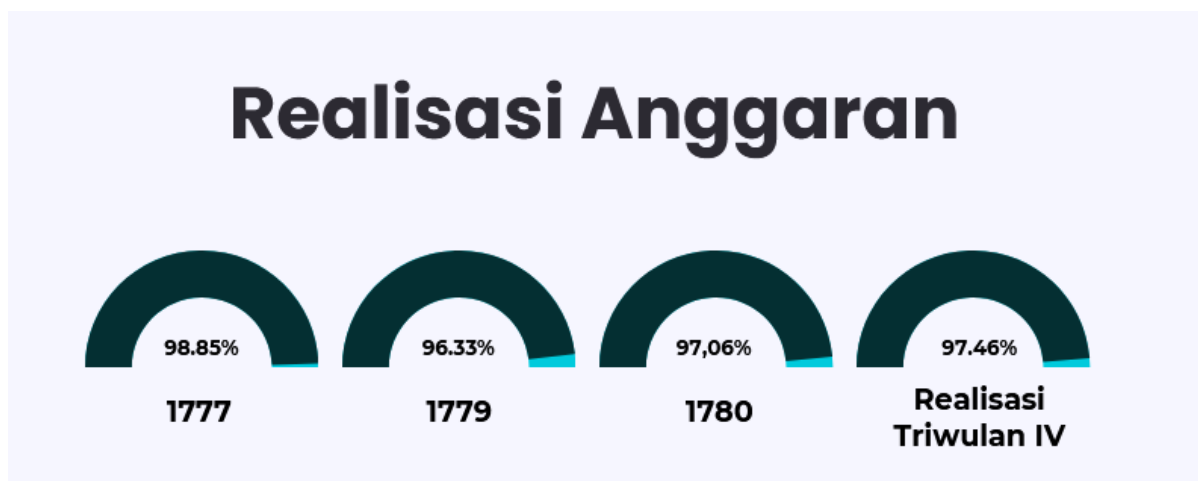
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN 2025											
		Volume Rincian Output	Jenis Komponen (Utama/ Pendukung)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	DESEMBER	TOTAL	SISA	%	FISIK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Operasional Laboratorium dan Klinik BPTP Pontianak						112.530.000	6.657.440	111.727.742	802.258	99,29		99,47
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen						6.704.733.000	215.199.752	6.507.322.383	197.410.617	97,06		97,79
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan						6.704.733.000	215.199.752	6.507.322.383	197.410.617	97,06		97,79
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit				6.500.733.000	199.766.990	6.306.419.005	194.313.995	97,01		97,76
1780.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan				9.600.000	-	9.580.310	19.690	99,79		99,85
052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat						9.600.000	-	9.580.310	19.690	99,79		99,85
A	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)						9.600.000	-	9.580.310	19.690	99,79		99,85
1780.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan				623.539.000	10.870.000	618.829.208	4.709.792	99,24		99,43
052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat						623.539.000	10.870.000	618.829.208	4.709.792	99,24		99,43
A	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak						62.579.000	980.000	61.730.403	848.597	98,64		98,98
B	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Pengawasan						10.854.000	780.000	10.490.000	364.000	96,65		97,48
C	Operasional Satuan Pengendalian Internal (SPI)						14.931.000	1.470.000	14.343.850	587.150	96,07		97,05
D	Administrasi Umum						535.175.000	7.640.000	532.264.955	2.910.045	99,46		99,59
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan				5.867.594.000	188.896.990	5.678.009.487	189.584.513	96,77		97,58
001	Gaji dan Tunjangan						4.068.381.000	62.328.000	3.986.023.921	82.357.079	97,98		98,48
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan						4.068.381.000	62.328.000	3.986.023.921	82.357.079	97,98		98,48
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						1.799.213.000	126.568.990	1.691.985.566	107.227.434	94,04		95,53
A	Pemeliharaan Kendaraan Operasional BPTP Pontianak						481.980.000	51.042.974	456.793.586	25.186.414	94,77		96,08
B	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						183.030.000	10.037.000	182.923.600	106.400	99,94		99,96
C	Langganan Daya dan Jasa						300.200.000	19.608.668	270.057.896	30.142.104	89,96		92,47
D	Honorarium Pengelola SATKER BPTP Pontianak						68.720.000	10.320.000	68.720.000	-	100,00		100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL	PERHITUNGAN 2025											
		Volume Rincian Output	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	DESEMBER	TOTAL	SISA	%	FISIK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	Operasional Website						105.872.000	5.018.330	102.893.816	2.978.184	97,19		97,89
G	Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor BPTP Pontianak						45.661.000	4.442.018	45.542.718	118.282	99,74		99,81
H	Pemeliharaan Peralatan dan fasilitas perkantoran						98.250.000	7.300.000	97.853.950	396.050	99,60		99,70
I	Honorarium pegawai kontrak						515.500.000	18.800.000	467.200.000	48.300.000	90,63		92,97
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM	59	Orang, Layanan, Rekomendasi				150.000.000	5.951.501	148.210.337	1.789.663	98,81		99,11
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	59	Orang				150.000.000	5.951.501	148.210.337	1.789.663	98,81		99,11
A	Peningkatan kualitas SDM Pegawai BPTP Pontianak						150.000.000	5.951.501	148.210.337	1.789.663	98,81		99,11
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen				54.000.000	9.481.261	52.693.041	1.306.959	97,58		98,18
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi						35.000.000	7.291.261	33.895.934	1.104.066	96,85		97,63
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat						35.000.000	7.291.261	33.895.934	1.104.066	96,85		97,63
Δ	Monitoring dan Evaluasi Satker BPTP Pontianak						35.000.000	7.291.261	33.895.934	1.104.066	96,85		97,63
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			68	Orang		19.000.000	2.190.000	18.797.107	202.893	98,93		99,20
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat						19.000.000	2.190.000	18.797.107	202.893	98,93		99,20
Δ	Pengelolaan administrasi Keuangan, Sistem Akutansi Intansi (SAI) dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran						19.000.000	2.190.000	18.797.107	202.893	98,93		99,20

Sumber: BPTP Pontianak 2025

Pada tahun anggaran 2025, berikut alokasi anggaran berdasarkan satuan kerja pada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi



a. Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

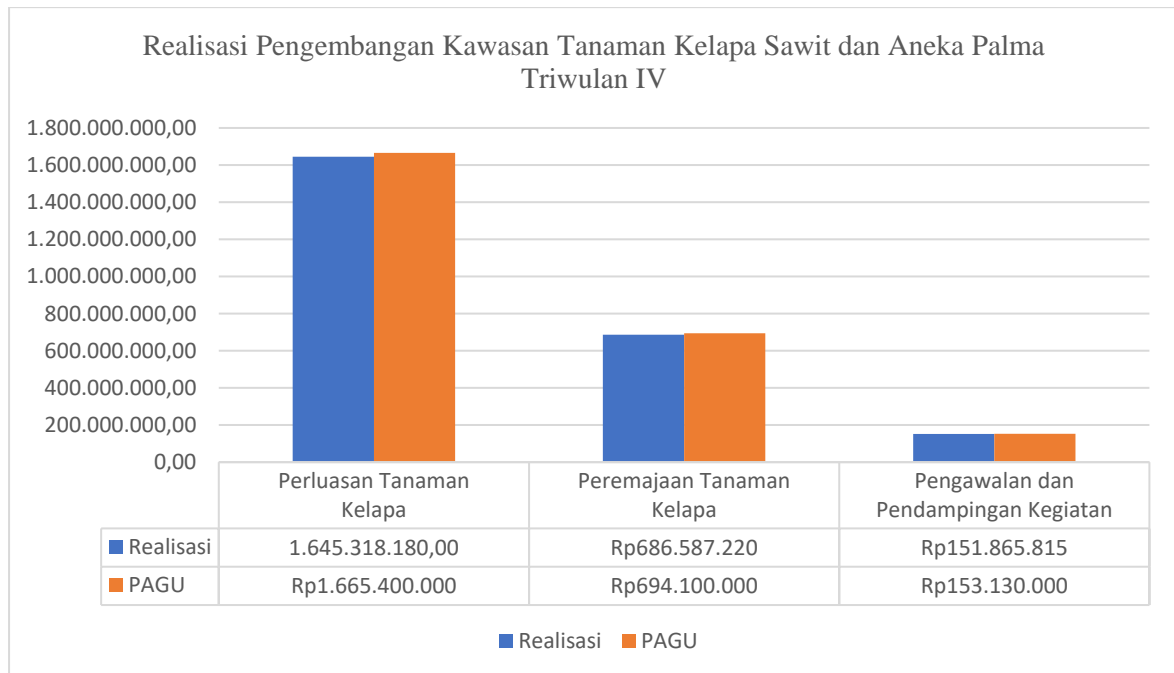
Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan pengembangan Kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma dengan total alokasi dana sebesar Rp2.514.470.000 dengan realisasi hingga T.A.2025 mencapai 98,85 % atau sebesar Rp 2.483.771.215.

Total alokasi dana tersebut mencakup tiga kategori kegiatan utama dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- **Perluasan Tanaman Kelapa:** Kegiatan ini memiliki pagu sebesar **Rp1.665.400.000** dengan realisasi mencapai **98,79%** atau sebesar **Rp1.645.318.180**. Program ini dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Kab. Bulungan (100 Ha), Kab. Ketapang (50 Ha), Kab. Sintang (100 Ha), dan Kab. Sanggau (100 Ha).
- **Peremajaan Tanaman Kelapa:** Alokasi untuk kegiatan peremajaan adalah sebesar **Rp694.100.000** dengan capaian realisasi sebesar **98,92%** atau setara dengan **Rp686.587.220**. Kegiatan ini mencakup wilayah Kab. Kotawaringin Timur (100 Ha) dan Kab. Mempawah (50 Ha).
- **Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan:** Kategori ini mendapatkan alokasi sebesar **Rp153.130.000** dengan tingkat realisasi sebesar **99,17%** atau **Rp151.865.815**. Beberapa sub-kegiatan dalam kategori ini bahkan mencapai realisasi sempurna **100%**,

seperti pada pendampingan di Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, dan Kab. Mempawah.

Grafik 2. Serapan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma



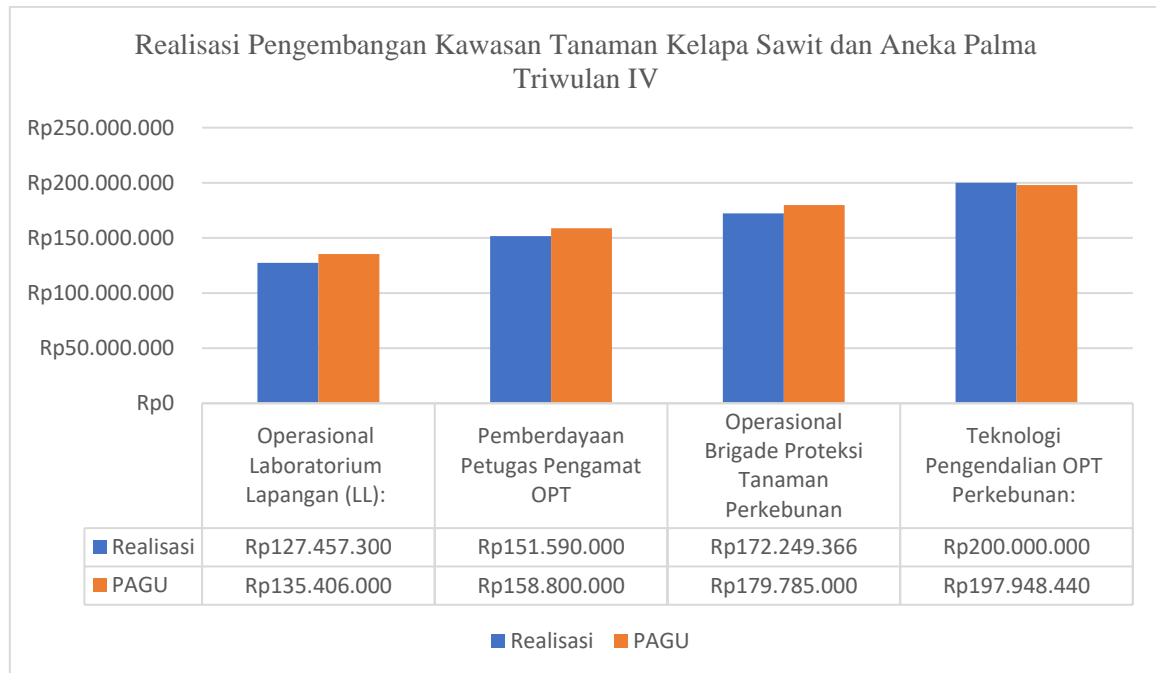
b. Penguatan Perlindungan Perkebunan.

Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan total alokasi dana sebesar Rp 673.991.000 dengan realisasi hingga T.A.2025 mencapai 96,33 % atau sebesar Rp 649.245.106 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Operasional Laboratorium Lapangan (LL): Realisasi anggaran sebesar 94,13% (Rp127.457.300) dari alokasi Rp135.406.000. Penyerapan tertinggi pada sub-kegiatan ini berada di wilayah Kalimantan Tengah (98,77%).
- Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT: Menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik sebesar 95,46% (Rp151.590.000) dari alokasi Rp158.800.000. Hampir seluruh wilayah (Kalteng, Kalsel, dan Kaltim) mencapai realisasi di atas 99%, kecuali Kalimantan Utara yang terealisasi sebesar 63,44%.
- Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan: Capaian realisasi sebesar 95,81% (Rp172.249.366) dari total pagu Rp179.785.000, dengan tingkat efisiensi penyerapan yang merata di wilayah Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.

- **Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan:** Program ini memiliki pagu **Rp200.000.000** dengan realisasi sangat tinggi mencapai **Rp197.948.440** atau **98,97%**. Penyerapan dana terbesar digunakan untuk **Operasional Laboratorium dan Klinik BPTP Pontianak** sebesar Rp111.727.742.

Grafik 3. Serapan Penguatan Perlindungan Perkebunan



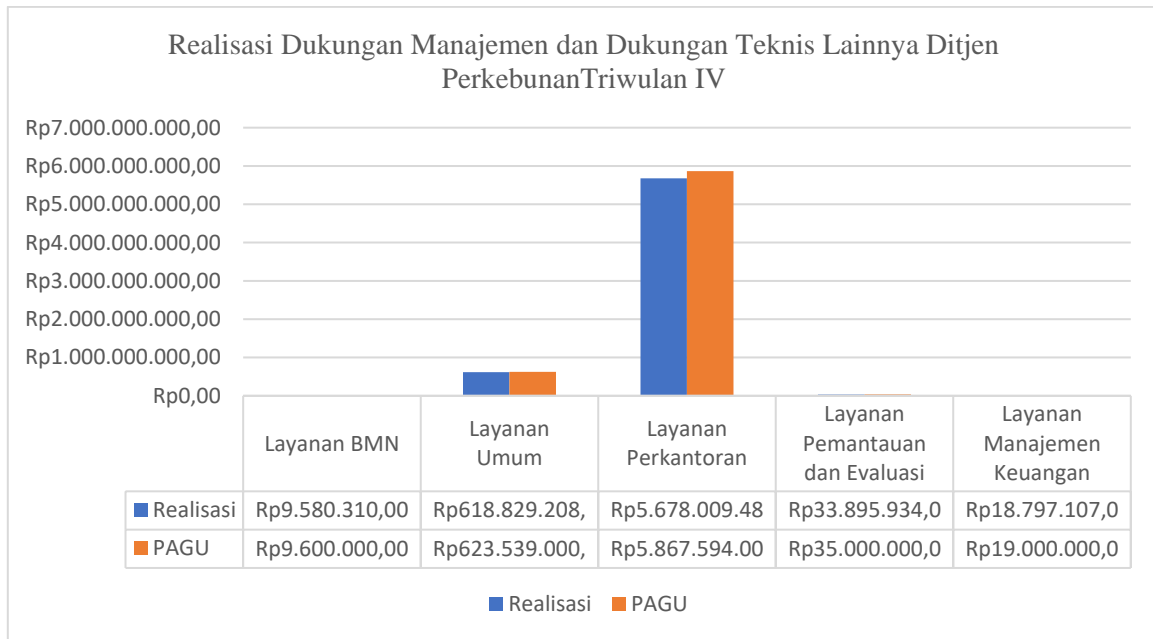
c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pada Tahun anggaran 2025, jenis kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup dengan total alokasi dana sebesar Rp 6.704.733.000 dengan realisasi hingga T.A.2025 mencapai 97,06 % atau sebesar Rp 6.507.322.383 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Layanan Perkantoran: Terealisasi sebesar 96,77% atau Rp5.678.009.487, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan (Rp3,98 Miliar).
- Layanan Umum: Mencapai realisasi 99,24% atau Rp618.829.208, termasuk di dalamnya pengelolaan informasi, dokumentasi, dan administrasi umum.
- Layanan BMN: Terealisasi sebesar 99,79% atau Rp9.580.310.
- Layanan Manajemen SDM: Program peningkatan kualitas SDM pegawai BPTP Pontianak ini memiliki alokasi Rp150.000.000 dengan realisasi mencapai 98,81% atau Rp148.210.337.

- Layanan Manajemen Kinerja Internal: Dengan total pagu Rp54.000.000, realisasi mencapai 97,58% atau Rp52.693.041. Realisasi ini mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi satker serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang mencapai di atas 96%.

Grafik 4. Serapan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan



Secara keseluruhan, BPTP Pontianak mengelola tiga program utama dengan total realisasi keuangan mencapai **97,46%** dan realisasi fisik sebesar **98,1%**. Program **Dukungan Manajemen (1780)** memegang alokasi anggaran terbesar, yaitu senilai **Rp6.704.733.000**, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **97,06%** dan capaian fisik **97,79%**. Program ini menjadi tulang punggung operasional organisasi karena mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (Rp3,98 Miliar), serta pengelolaan administrasi umum dan peningkatan kualitas SDM yang berhasil mencapai realisasi di atas **98%**. Efisiensi pada program ini terlihat dari optimalisasi layanan digital melalui aplikasi DiKLIK dan koordinasi hibrida yang menekan biaya operasional tanpa menurunkan kualitas layanan publik.

Sebagai perbandingan, program **Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (1777)** menunjukkan tingkat efisiensi fisik tertinggi dengan realisasi fisik mencapai **99,14%**, meskipun penyerapan anggarannya berada di angka **98,85%** dari total pagu **Rp2.512.630.000**. Dinamika pada program ini difokuskan pada kegiatan intervensi fisik berupa perluasan dan peremajaan kawasan kelapa seluas 500 hektar di berbagai

kabupaten strategis seperti Bulungan, Sintang, dan Sanggau. Meskipun menghadapi kendala administratif dengan stakeholder yang terkait, program ini tetap mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui distribusi benih dan pupuk yang tepat sasaran.

Sementara itu, program **Penguatan Perlindungan Perkebunan (1779)** memiliki alokasi anggaran terkecil namun merupakan program yang mendukung fungsi utama BPTP Pontianak dalam Pelindungan Perkebunan di wilayah Kalimantan, yang secara teknis, memiliki pagu sebesar **Rp673.991.000** dengan realisasi keuangan **96,33%** serta fisik **97,25%**. Program ini difokuskan pada mitigasi risiko kehilangan hasil akibat OPT melalui operasional Laboratorium Lapangan (LL) dan pemberdayaan petugas pengamat di seluruh Kalimantan. Keberhasilan program ini tercermin dari pemenuhan **100% layanan pelindungan** untuk enam komoditas prioritas, di mana tim teknis berhasil menerbitkan **32 surat rekomendasi** pengendalian OPT secara tepat waktu meskipun didukung sumber daya manusia yang terbatas.

Secara akumulatif, ketiga program ini bersinergi untuk mencapai tugas dan fungsi BPTP Pontianak. Program 1780 menjamin stabilitas manajemen, Program 1777 mendorong produktivitas perkebunan di wilayah BPTP Pontianak, dan Program 1779 mendukung Pelindungan Perkebunan secara teknis terhadap ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim di wilayah Kalimantan.

#### **D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pengukuran terhadap seluruh **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)** yang tercantum dalam **Perjanjian Kinerja (PK)** mengacu pada panduan manual IKU yang telah disepakati saat penyusunan IKSP di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sementara itu, penghitungan aspek **Efisiensi (E)** pada level satuan kerja berpedoman pada **PMK Nomor 22 Tahun 2021** mengenai Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Adapun formulasi yang digunakan adalah:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAROi : alokasi anggaran RO i  
RAROi : realiasi anggaran RO i  
CROi : capaian RO i

Sedangkan untuk mengukur Nilai Efisiensi (NE) digunakan formula sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan formulasi di atas, suatu kegiatan dikategorikan **efisien** apabila perolehan nilai efisiensinya mencapai minimal **50%**. Namun, jika angka efisiensi menembus di atas **100%**, hasil tersebut tetap dianggap efisien tetapi dikategorikan sebagai **anomali**, sehingga memerlukan klarifikasi atau penjelasan tambahan lebih mendalam.

Berikut tabel Analisis Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Kegiatan	Fisik					Anggaran (Rp)			Efisiensi	Nilai Efisiensi (%)
		Target		Realisasi			Pagu	Realisasi	%		
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	%					
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	7	unit	7	unit	97,25	473.991.000	451.296.666	95,21	0,02	55,09
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1	unit	1	unit	99,23	200.000.000	197.948.440	98,97	0,002	50,64
<b>TOTAL/RATA-RATA</b>							<b>673.991.000</b>	<b>649.245.106</b>	<b>96,32</b>	<b>0,019</b>	<b>54,78</b>

Sumber: BPTP Pontianak 2025

Tabel 26 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas

Kode	Kegiatan	Fisik					Anggaran (Rp)			Efisiensi	Nilai Efisiensi (%)
		Target		Realisasi			Pagu	Realisasi	%		
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	%					
1780.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1	Layanan	99,85	9.600.000	9.580.310	99,79	0,0006	50,14
1780.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan	99,43	623.539.000	618.829.208	99,24	0,0019	50,46
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	97,58	5.867.594.000	5.678.009.487	96,77	0,0081	52,03
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	59	Orang	59	Orang	99,11	150.000.000	148.210.337	98,81	0,0030	50,76
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	97,63	35.000.000	33.895.934	96,85	0,0078	51,96
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	68	Orang	68	Orang	99,20	19.000.000	18.797.107	98,93	0,0027	50,67
<b>TOTAL/RATA-RATA</b>							<b>6.704.733.000</b>	<b>6.507.322.383</b>	<b>97,05</b>	<b>0,0174</b>	<b>54,36</b>

*Sumber: BPTP Pontianak 2025*

- a. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan.

Secara akumulatif, **Program 1779** mengelola pagu sebesar **Rp673.991.000** dengan total realisasi keuangan mencapai **Rp649.245.106 (96,32%)**. Rincian analisis efisiensi per sub-kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Perangkat Perlindungan Perkebunan (1779.CAG.001):** Sub-kegiatan ini mencatatkan realisasi keuangan sebesar **95,21%**, namun mampu mencapai realisasi fisik yang lebih tinggi yaitu **97,25%**. Hal ini menghasilkan **Nilai Efisiensi sebesar 55,09%**, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran untuk operasional laboratorium lapangan dan pemberdayaan petugas pengamat OPT dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
- **Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan (1779.CAG.002):** Sub-kegiatan ini menunjukkan performa fisik yang sangat baik mencapai **99,23%** dengan realisasi anggaran sebesar **98,97%**. Kondisi ini menghasilkan **Nilai Efisiensi sebesar 50,64%**, yang didorong oleh penerapan teknologi pengendalian OPT yang responsif terhadap dinamika serangan di lapangan sehingga meminimalisir risiko kerugian ekonomi bagi pekebun.

Secara keseluruhan, rata-rata **Nilai Efisiensi** untuk program ini mencapai **54,78%**. Angka ini membuktikan bahwa BPTP Pontianak mampu menghasilkan *output* layanan perindungan tanaman perkebunan secara maksimal.

- b. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas .

Secara akumulatif, Program 1780 mengelola pagu sebesar **Rp6.704.733.000** dengan total realisasi keuangan mencapai **Rp6.507.322.383 (97,05%)**. Rincian analisis efisiensi per sub-kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Layanan Perkantoran (1780.EBA.994):** Sebagai penopang utama operasional dengan anggaran terbesar, sub-kegiatan ini mencatatkan realisasi keuangan **96,77%** namun mampu mencapai realisasi fisik **97,58%**. Hal ini menghasilkan nilai efisiensi sebesar **52,03%**, yang menunjukkan pengelolaan biaya gaji dan operasional kantor dilakukan secara tepat guna.
- **Layanan Umum (1780.EBA.962) dan BMN (1780.EBA.956):** Kedua layanan ini menunjukkan performa fisik yang sangat tinggi (di atas **99%**) dengan nilai efisiensi masing-masing sebesar **50,46%** dan **50,14%**. Efisiensi ini didorong oleh optimalisasi fasilitas fisik dan digital yang menunjang layanan publik.

- **Manajemen SDM dan Tata Kelola:** Layanan SDM (1780.EBC.954) mencatatkan nilai efisiensi **50,76%** melalui pengelolaan 59 orang pegawai secara produktif. Sementara itu, Layanan Pemantauan (NE **51,96%**) dan Manajemen Keuangan (NE **50,67%**) menjamin bahwa sisa anggaran tidak mengganggu kualitas dokumen pelaporan dan akuntabilitas keuangan organisasi.

Secara keseluruhan, rata-rata Nilai Efisiensi untuk program ini mencapai **54,36%**. Angka ini membuktikan bahwa BPTP Pontianak mampu menghasilkan *output* Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas.

## **BAB. IV PENUTUP**

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak pada tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan Sangat Baik dan berhasil memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini direpresentasikan melalui realisasi fisik sebesar 98,1% dan realisasi keuangan mencapai 97,46%. Seluruh indikator kinerja utama, termasuk layanan pelindungan untuk enam komoditas strategis dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 3,70 (predikat Sangat Baik), berhasil mencapai target 100%. Keberhasilan ini merupakan pondasi kuat dalam mengawali periode Rencana Strategis 2025–2029 untuk mewujudkan pelindungan tanaman yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan.

Pada penyelenggaraan fungsi BPTP Pontianak, organisasi masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerja di lapangan. Pertama, terdapat keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), di mana organisasi hanya didukung oleh 68 orang PNS Pusat untuk menjangkau wilayah kerja yang sangat luas di seluruh Kalimantan. Kedua, dinamika alam akibat perubahan iklim terus meningkatkan risiko munculnya serangan OPT baru yang menuntut respons cepat petugas lapangan. Ketiga, terjadi hambatan administratif dalam penyerapan anggaran yang melibatkan koordinasi berlapis dengan banyak pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, hingga kelompok tani di daerah. Permasalahan ini mengharuskan organisasi untuk terus bersikap adaptif dalam mengelola sumber daya terbatas guna memitigasi risiko pelindungan perkebunan di wilayah kerja BPTP Pontianak.

Sebagai langkah dalam peningkatan kinerja di masa mendatang, BPTP Pontianak berkomitmen melakukan digitalisasi layanan secara masif melalui platform seperti aplikasi DiKLIK untuk mempercepat respon terhadap laporan serangan OPT. Langkah strategis lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM, serta melakukan penderasan informasi mengenai regulasi tarif layanan sesuai PMK Nomor 85 Tahun 2023 untuk menjamin transparansi pelayanan publik. Pada Tahun 2026, BPTP Pontianak diharapkan dapat lebih antisipatif terhadap kendala lapangan sehingga akuntabilitas kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.


# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Struktur Organisasi BPTP Pontianak



Sumber: BPTP Pontianak 2025

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPTP Pontianak



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3  
GEDUNG C PASAR MINGGILI - JAKARTA 10520  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE: <http://diperkebun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BPTP Pontianak**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gabriel Lulus Pujihantoro  
Jabatan : Kepala BPTP Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Roni Angkat  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkebunan


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

  
Abdul Roni Angkat

  
Gabriel Lulus P.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BPTP Pontianak**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Layanan Pelindungan Tanaman Perkebunan	1-1	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-2	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-3	Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-4	Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-5	Persentase layanan pelindungan komoditas karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
		1-6	Persentase layanan pelindungan komoditas kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	100%
2	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	2-1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan BPTP Pontianak	3,00 Skala Likert (1-4)


No. Kegiatan Anggaran

1.	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Rp. 2.512.630.000,-
2.	Penguatan Pelindungan Perkebunan	Rp. 673.991.000,-
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 6.704.733.000,-

Jakarta, Desember 2025


Pihak Kedua Pihak Pertama

  
Abdul Roni Angkat

  
Gabriel Lulus P.H

**Sumber:** PK Kepala BPTP Pontianak 2025

## Lampiran 3. SK Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Pontianak T.A. 2025.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK</b></p> <p style="text-align: center;"><small>JALAN BUKIT LITOMO NO 17 SEWANTAN KELU, PONTIANAK 70411 TELEP. (0561) 843632 FAX. (0561) 842754 WEBSITE: <a href="http://id.pertanian.go.id">id.pertanian.go.id</a></small></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK NOMOR: 3803/Kpts./KP.010/ES.6/08/2025 T E N T A N G PERUBAHAN KETIGA TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK T.A. 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi instansi pemerintah;</p> <p>c. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan adanya Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Kinerja dan Pelaporan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.</p> <p>Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;</p> <p style="text-align: center;">-1-</p>	<p style="text-align: center;">-2-</p> <p>5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tanggal 28 Juli 2025, Nomor : 631/Kpts/KP.230/AJ/07/2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Menetapkan : <b>KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) LINGKUP SATKER BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK T.A. 2025</b></p> <p>KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.</p> <p>KEDUA : Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak bertugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak;</li> <li>2. Pengumpulan dan Pengujian Bukti Pendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak;</li> <li>3. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak;</li> <li>4. Melakukan Monitoring Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Secara Berkala;</li> <li>5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak;</li> <li>6. Melakukan Dokumentasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak;</li> </ol> <p>KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">-</p>
---	---

-3-

DITETAPKAN DI : PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2025

KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN  
PERKEBUNAN PONTIANAK

  
GABRIEL LULUS PH, S.Si, M.P.  
NIP. 197109251999031001

-4-

LAMPIRAN :

NOMOR : 3803/Kpts./KP.010/E5.6/08/2025  
TANGGAL : 07 AGUSTUS 2025

PERHAL : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM EVALUATOR INTERNAL  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS PEMERINTAH (AKIP) LINGKUP  
SATKER BALAI PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK  
T.A. 2025

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak  
Pengarah : Kepala Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak  
Ketua : Ka.Subbag Tata Usaha  
Sekretaris : PPK  
Tim Evaluator : 1. Hithman Sitorus, S.P (Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis);  
2. Moh. Salman Akhyar, S.Si (Ketua Tim Kerja Layanan Data  
dan Informasi);  
3. Anastasia Raditya Hidayanti, S.Si (Ketua Tim Kerja  
Layanan Laboratorium).  
Anggota : 1. Maria Agnes Siregar, S.Ak (Laporan Bulanan);  
2. Meta Amalia, SP (Monitoring Evaluasi) (E-SAKIP);  
3. Suprptono, A.Md (Laporan Kepegawaian);  
4. Alexander Fleming Sihombing, SP (Perkebunan dalam  
angka);  
5. Hendra Saputra, S.Kom (Laporan Kinerja/Laporan  
Tahunan BPTP Pontianak/E-SAKIP);  
7. Annisa Dehriul, SP (Laporan Data dan Informasi).

DITETAPKAN DI : PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2025

KEPALA BALAI PELINDUNGAN TANAMAN  
PERKEBUNAN PONTIANAK

  
GABRIEL LULUS PH, S.Si, M.P.  
NIP. 197109251999031001

**Sumber:** SK Kepala BPTP Pontianak 2025

### Lampiran 3. Data Kepegawaian BPTP Pontianak

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan Jabatan	Pangkat	Gol	GRADE	TTL	Tingkat Pendidikan		
									Pendidikan	Fakultas	Jurusan
1	Gabriel Lulus Puji Hantoro, S.Si.,MP	197109251999031001	Kepala BPTP Pontianak	Struktural	Pembina TK I	IVB	13	Magelang, 25-09-1971	S2 (Master)	Pertanian	Ilmu Hama dan Tumbuhan
2	Periyanti, SP	198102232002122002	Kasubbag Tata Usaha	Struktural	Penata Muda TK I	IIIB	9	Panji Ngabang, 23-02-1981	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
3	Sunarti, SP	197310131999032001	POPT Ahli Madya	Fungsional Khusus	Pembina	IVA	11	Bandung, 13-10-1973	S1 (Sarjana)	Pertanian	Hama dan Penyakit Tumbuhan
4	Moh Salman Ahyar, S. Si	197107211999031002	POPT Ahli Muda/KTK Datin	Fungsional Khusus	Pembina	IVA	9	Cirebon, 21-07-1971	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi, Mikrobiologi
5	Erwin Irawan Permana, SP	198307132009011006	POPT Ahli Muda	Fungsional Khusus	Pembina	IVA	9	Bandung, 13-07-1983	S1 (Sarjana) /Izin Belajar S2	Pertanian	Hama Penyakit dan Tumbuhan
6	Hithman Sitorus, SP	197111242002121002	POPT Ahli Madya/KTK Yantek	Fungsional Khusus	Pembina	IVA	11	Parengil, 24-11-1971	S1 (Sarjana)	Pertanian	Budidaya Pertanian Agronomi
7	Erlan Adriana Rismansyah, SP	197502072009011006	POPT Ahli Muda	Fungsional Khusus	Penata TK I	IIID	9	Magelang, 07-02-1975	S1 (Sarjana)	Pertanian	Hama dan Penyakit Tumbuhan
8	Sri Agustina, SP	197608212002122002	POPT Ahli Muda	Fungsional Khusus	Penata	IIIC	9	Mempawah, 21-08-1976	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
9	Khoir Samsi, SP	199303062018011001	POPT Ahli Muda	Fungsional Khusus	Penata	IIIC	9	Gelumbang, 06-03-1993	S1 (Sarjana)	Pertanian	Proteksi Tanaman, Ilmu hama dan Penyakit Tumbuhan
10	Anastasia Raditya H, S.Si	198608022015032002	POPT Ahli Pertama/KTK Jarlab	Fungsional Khusus	Penata	IIIC	8	Madiun, 02-08-1986	S1 (Sarjana) /Izin Belajar S2	MIPA	Biologi, Bioteknologi
11	Moch. Yadi Nurjayadi, S.Si., M.Si	198611122018011001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata	IIIC	8	Cirebon, 12-11-1986	S2 (Master)	Pertanian	Fitopatologi
12	Tiara Dwi Nurmali, S.Si	199410162018012001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda TK I	IIIB	8	Malang, 16-10-1994	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
13	Siti Rosalina. Br. Ginting, S.Si	198712262019022001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda TK I	IIIB	8	Sigenderang, 26-12-1987	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
14	Isnawan Safi'i, S.Si	198311272019021001	POPT Ahli Muda	Fungsional Khusus	Penata	IIIC	9	Klaten, 27-11-1983	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi, Bioteknologi
15	Sinta Maria Br. Sitepu, S.E	199407022019022001	POPT Mahir	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IID	7	Marike, 02-07-1994	D3 (Diploma III)	Pertanian	Agribisnis
16	Elsi Kasturi, A.Md	199512082019022001	POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IID	6	Bukit Sikumpa, 08-12-1995	D3 (Diploma III)	Pertanian	Budidaya Tanaman Pangan
17	Sella Yuliska, A.Md	199507032019022004	POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IID	6	Pontianak, 03-07-1995	D3 (Diploma III)	Pertanian	Teknologi Pertanian
18	Jepri Malau, S.E	199307242019021001	POPT Mahir	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IIIA	7	S Siambaton, 24-07-1993	D3 (Diploma III)	Pertanian	Teknologi Manajemen dan Produksi Perkebunan
19	Samuel Apriyan Mangunsong, A.Md	199604222019021001	POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IID	6	Pontianak, 22-04-1996	D3 (Diploma III)	Pertanian	Teknologi Manajemen dan Produksi Perkebunan
20	Lisa Fathonah	200104302020122001	POPT Pemula	Fungsional Khusus	Pengatur Muda	IIA	5	Pasuruan, 30-04-2001	SMA /SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) /Izin Belajar	-	Pertanian
21	Fitra Jeniria, S.Si	199109112022032001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 11-09-1991	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan Jabatan	Pangkat	Gol	GRADE	TTL	Tingkat Pendidikan		
									Pendidikan	Fakultas	Jurusan
22	Kabul Santoso, S.Si	199403152022031001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 15-03-1994	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
23	Maudiyani Yurnanti, SP	200006162022032001	POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Agam, 16-06-2000	S1 (Sarjana)	Pertanian	Hama dan Penyakit Tumbuhan
24	Hadad Ikram, A.Md.P	199606192022031001	POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	6	Lampung, 19-06-1996	D3 (Diploma III)	Pertanian	Agribisnis
25	Whisnu Japonda Ariestian, A.Md.P	199301202022031002	POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	6	Lebak, 20-01-1993	D3 (Diploma III)	Pertanian	Teknologi Pertanian
26	Suprptono, A.Md	199807012022031001	Terampil – Pranata SDM Aparatur	Fungsional Khusus	Pengatur TK I	IID	6	Pontianak, 01-07-1998	D3 (Diploma III)	Ilmu Sosial dan Politik	Kesekretariatan
27	Hermanu Sigit Atmojo	196802112002121001	Pengadministrasi Perkantoran	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	5	Gunung Kidul, 11-02-1968	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	Sekolah Pertanian	Pertanian
28	Hari Andrianto	197102262007011001	Pengadministrasi Perkantoran	Fungsional Umum/Pelaksana	Pengatur TK I	IID	5	Pontianak, 26-02-1971	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	Sekolah Menengah Ekonomi	Perkantoran
29	Defy Syahputra, SP	198801202015031001	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	6	Batubara, 20-01-1988	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
30	Juliyanto	197405072002121005	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	6	Peniti Luar, 07-05-1974	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	Teknologi Pertanian	Agronomi
31	Adytia Anggara Putra, S.Si	199306122020121005	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Pengatur TK I	IID	6	Medan, 12-06-1993	D3 (Diploma III)	MIPA	Kimia
32	Alexander Fleming Sihombing, SP	198112022002121002	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	6	Mempawah, 02-12-1981	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
33	Bambang Agus Sulaksono, SP	197208212012121001	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata	IIIC	6	Pati, 21-08-1972	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agronomi
34	Catur Heru Trisianto, SP	198210182008121001	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	6	Demak, 18-10-1982	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
35	I Gede Oka Mahendra Sidhi Pramesti, S.A	199704142022031002	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	6	Surabaya, 14-04-1997	S1 (Sarjana)	Ekonomi	Akuntansi
36	Hendra Gawansyah, SP	197409302002121001	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata TK I	IIID	7	Karimunting, 30-09-1974	S1 (Sarjana)/Izin Belajar S2	Pertanian	Ilmu Tanah
37	Saverius Alimin	196806252002121002	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	6	Nyarungkop, 25-06-1968	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	-	Ilmu Sosial
38	Suwarno	197207232002121002	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	6	Pontianak, 23-07-1972	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	-	Ilmu Sosial
39	Nurul Fadhilah Tarigan, S.E	199308272020122004	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Pengatur TK I	IID	7	Medan, 27-08-1993	D3 (Diploma III)	Ekonomi	Akuntansi
40	Chrisman, ST	197112262002121001	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata TK I	IIID	7	Sintang, 26-12-1971	S1 (Sarjana)	Teknik	Elektro dan Informatika
41	Suadin, SP	197405102003121002	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata TK I	IIID	7	Gawan, 10-05-1974	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
42	Meta Amalia, SP	198508262014032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	7	Jakarta, 26-08-1985	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
43	Maria Agnes Siregar, S.Ak	197706262002122002	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	7	Sanggau, 22-06-1996	S1 (Sarjana)	Ekonomi	Akuntansi
44	Siti Winarti	199606222022032001	Pengadministrasi Perkantoran	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	5	KP Jawa Tengah, 26-06-1977	SMA/(Sekolah Menengah Atas)	-	Kuangan
45	Astri Anjelina Nasution, S.Si	198508202014032001	Operator Laboratorium	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda TK I	IIIB	6	Padan Sidempuan, 20-08-1985	S1 (Sarjana)/Tugas Belajar S2	MIPA	Kimia
46	Risa Nurlaili Qodariah, A.Md.T	200004032022032001	Operator Laboratorium	Fungsional Umum/Pelaksana	Pengatur	IIC	6	Bandung, 03-04-2000	D3 (Diploma III)	MIPA	Teknik Kimia
47	Acil Pratama, SP	199201102020121001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIB	7	Payakumbuh, 10-01-1992	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan Jabatan	Pangkat	Gol	GRADE	TTL	Tingkat Pendidikan		
									Pendidikan	Fakultas	Jurusan
48	Edi Sakra Damanik, SP	199105192020121003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIB	7	Pematangsiantar, 19-05-1991	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
49	Hendra Saputra, S.Kom	199107222022031001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	7	Samarinda, 22-07-1991	S1 (Sarjana)	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Ilmu Komputer
50	Annisa Dahrul, SP	199308282022032001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	7	BukitTinggi, 28-08-1993	S1 (Sarjana)	Pertanian	Agroteknologi
51	Iis Sulastri	197708112025212002	Operator Layanan Operasional	Fungsional Umum/Pelaksana	-	V	5	Garut, 08-11-1977	SLTA PAKET C	Umum	-
52	Joni Firmansyah	198206232025211035	Operator Layanan Operasional	Fungsional Umum/Pelaksana	-	V	5	Pontianak, 23 Juni 1982	SMK		Kerajinan Keramik
53	Hazir Ismail	200403032025211002	Operator Layanan Operasional	Fungsional Umum/Pelaksana	-	V	5	Pontianak, 03 Maret 2004	SMK		Desain dan Produk Kreatif Kriya
54	Sugianto	198105072025211019	Pengadministrasi Perkantoran	Fungsional Umum/Pelaksana	-	V	5	Landak, 05-07-1971	SMA	Umum	-
55	Narendra Vita Dhewany, A.Md	199611172025052006	Arsiparis Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	6	Blitar, 17-11-1996	D3 (Diploma III)	Ilmu Administrasi	Kesekretariatan
56	Hawa Al Firdausy, S.I.Kom.	200010132025052012	Calon Pranata Humas Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Jakarta, 13-10-2000	S1 (Sarjana)	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi
57	Lia Suhada, S.E	199403062025052007	Calon Analis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 06-03-1994	S1 (Sarjana)	Ekonomi	Ekonomi Islam
58	Jean Lawalata, A.Md.Ak.	199906282025052013	Calon Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	7	Ambon, 28-06-1999	D3 (Diploma III)	Ekonomi	Akuntansi
59	Alid Hakiki, A.Md.Ak	200005222025051002	Calon Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	7	Pontianak, 22-05-2000	D3 (Diploma III)	Ekonomi	Akuntansi
60	Yudi Arif Firmansyah, S.Kom.	199908062025051004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 06-08-1999	S1 (Sarjana)	MIPA	Sistem Informasi
61	Yuniari Hanggraini, S.Kom.	199406272025052004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional Umum/Pelaksana	Penata Muda	IIIA	8	Semarang, 27-06-1994	S1 (Sarjana)	Teknologi Informasi	Sistem Informasi
62	Donatus Tia Harfan, S.Si.	199509202025051005	Calon POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 20-09-1995	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
63	Risky Prasetyo, S.Si.	199906072025051004	Calon POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Natar, 08-06-1999	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
64	Muhammad Sunariya, S.Si.	200004152025051003	Calon POPT Ahli Pertama	Fungsional Khusus	Penata Muda	IIIA	8	Pontianak, 15-04-2000	S1 (Sarjana)	MIPA	Biologi
65	Syakhis Amri, A.Md.	199805212025051001	Calon POPT Terampil	Fungsional Khusus	Pengatur	IIC	6	Banyumas, 21-05-1998	D3 (Diploma III)	Biologi	Sumber Daya Perikanan
66	Wachid Shobiriana	199601102025051004	Calon POPT Pemula	Fungsional Khusus	Pengatur Muda	IIA	5	Purworejo, 10-01-1996	SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas)		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
67	Jelin Afharensa	200303092025051002	Calon POPT Pemula	Fungsional Khusus	Pengatur Muda	IIA	5	Sugih Waras, 09-03-2003	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)		Agribisnis Tanaman Perkebunan
68	Sania Ronauliy Siahaan	199904162025052005	Calon POPT Pemula	Fungsional Khusus	Pengatur Muda	IIA	5	Jakarta, 16-04-1999	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Sumber: BPTP Pontianak 2025**

Lampiran 4. Rekomendasi Teknis BPTP Pontianak Tahun 2025

No.	Tanggal Pemenuhan Layanan	Hal	Komoditas	Keterangan
1.	02 Januari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Gumono (Melawi)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
2.	02 Januari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Eriadi Robertus (Sanggau)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
3.	02 Januari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit - Libertus Iskandar, S.Kom (Sanggau)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
4.	31 Januari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Sunandi (Kubu Raya)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
5.	05 Februari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa – A. Rahman (Pontianak)</a>	Kelapa	TERPENUHI
6	28 Februari 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Nurdin (Sambas)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
7.	24 Maret 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit - Asnadin (Kubu Raya)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
8.	07 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Bayu (Landak)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
9.	07 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit – Firmansyah (Landak)</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
10.	07 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Karet – Ya’ Budiansyah (Landak)</a>	Karet	TERPENUHI
11.	16 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit-Ya’ Budiansyah</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
12.	26 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kopi-Wahyudi</a>	Kopi	TERPENUHI

No.	Tanggal Pemenuhan Layanan	Hal	Komoditas	Keterangan
13.	26 Mei 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit-Joni</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
14.	16 Juni 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa - Suparman</a>	Kelapa	TERPENUHI
15.	19 Juni 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kopi-Muhammad Amin</a>	Kopi	TERPENUHI
16.	19 Juni 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kopi-Muhammad Amin</a>	Kopi	TERPENUHI
17.	18 Juli 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit - Bapak Asnadin</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
18.	31 Juli 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Lada -Memet</a>	Lada	TERPENUHI
19.	01 Agustus 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Lada-Yanto</a>	Lada	TERPENUHI
20.	05 Agustus 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Lada-Yanto</a>	Lada	TERPENUHI
21.	22 Agustus 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kopi-Musliadi</a>	Kopi	TERPENUHI
22.	08 September 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanama Kelapa Sawit-Said</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
23.	19 September 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kopi-Anwar</a>	Kopi	TERPENUHI
24.	26 September 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit-Bapak Gimin</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
25.	29 Oktober 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa-Muhammad Tholib</a>	Kelapa	TERPENUHI
26.	30 Oktober 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kelapa Sawit-Uzman</a>	Kelapan Sawit	TERPENUHI

No.	Tanggal Pemenuhan Layanan	Hal	Komoditas	Keterangan
27.	28 November 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kelapa Sawit-Muadim</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
28.	28 November 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kelapa Sawit-Agato</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
29.	28 November 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kelapa-Ade Vita Yuliarto</a>	Kelapa	TERPENUHI
30.	15 Desember 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Kelapa Sawit-KUD Karya Mulya</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
31.	24 Desember 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kelapa Sawit-Juliyanto</a>	Kelapa Sawit	TERPENUHI
32.	30 Desember 2025	<a href="#">Rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Kakao-Sugianto</a>	Kakao	TERPENUHI